

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Arifin Zainul, 2002, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Anggota IKAPI : Jakarta.
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan : Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*, Djambatan : Jakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka : Jakarta.
- Djuhaendah Hasan, 2004, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya : Bandung.
- Djuhaendah Hasan dan Saklmidjas Salam, 2000, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Alumni : Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo : Yogyakarta.
- Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press : Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2008, *Hak Tanggungan*, Kencana : Jakarta.
- H.Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta.
- H.Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV. Mandar Maju : Bandung.

I. G. A. D Sari, Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K. (2018). *Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 41-58.p. 4.

Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola : Surabaya.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan dalam Teori & Praktik*, Alumni : Bandung.

M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama : Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantara Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group : Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang, Makalah Bulanan Yuridika No.5-6 Tahun XII September-Desember*, Universitas Airlangga : Surabaya.

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2006, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang.

Rachmadi Usman, 1999, *pasal-pasal tentang Hak Tanggungan atas Tanah*, Djambatan : Jakarta.

Ronny. H Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia : Jakarta.

Said Sampara, dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media : Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama : Bandung.

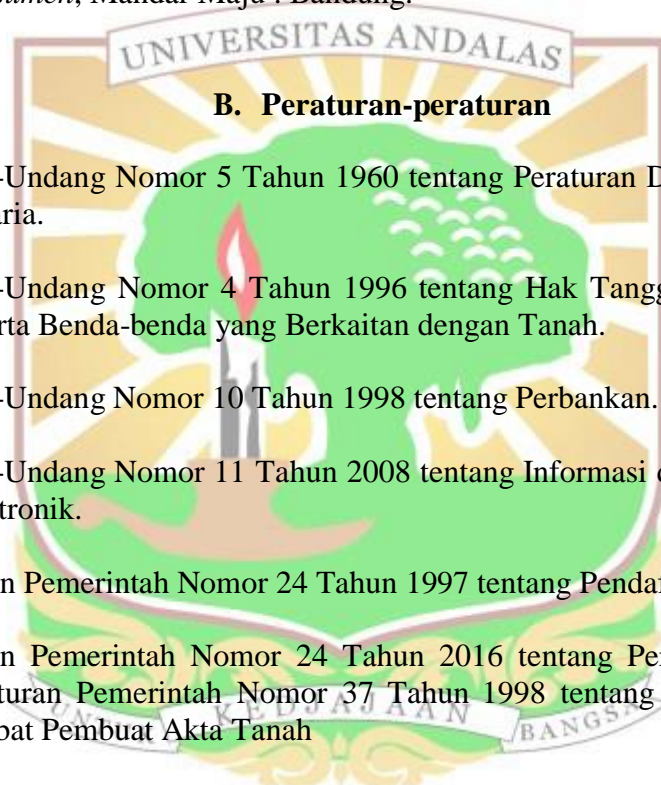
Sudaryanto W, 1996, *Pokok-pokok Kebijakan Undang-Undang Hak Tanggungan*, Hukum Universitas Trisakti : Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Alumni : Bandung.

Soedikno Mertokusumo, 1998, *Hukum dan Pokok Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka : Jakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Grup : Jakarta.

Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju : Bandung.



## **B. Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

## **C. Jurnal**

Jefri Guntoro, dkk., "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik", *Bengkoelen Justice*, Vol.10 No. 2 (November, 2020).

Iga Gangga Santi Dewi, Mira Novana, “Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2020).

I Made Dwi Gunarta, dkk., “Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 3 No. 3 (September, 2020).

I Wayan Jody Bagus Wiguna, “Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Secara Elektronik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 05 (April, 2020).

Nadia Imanda, “Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, *Notaire*, Vol.3 No. 1 (Februari, 2020).

Sari, I. G. A. D., Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K., “Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, (April, 2018).

#### **D. Lain-lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 18 Februari 2021

I Made Pria Dharsana, I Gusti Agung Jordika Pramanditya, 2019, *Kedudukan Dan Kepastian Hukum HT Elektronik*, <https://notarymagazine.com/kedudukan-dan-kepastian-hukum-ht-elektronik/>, (diakses tanggal 02 Februari 2021).



